

**ANALISIS PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 1995-1999**

**SKRIPSI**

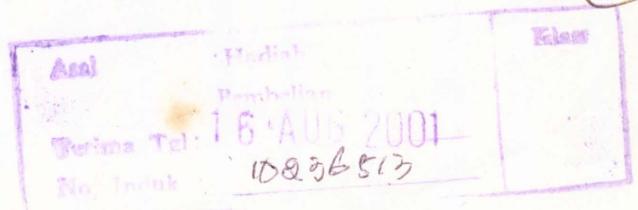


**Oleh**

**Langgeng Dwi Hantoyo**  
NIM : DIAI95-104

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2001**

33085280  
(ADW)  
e



## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENENTUAN SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 1995-1999

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**N a m a** : Langgeng Dwi Hantoyo

**N. I. M.** : DIA 195-104

**Jurusan** : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

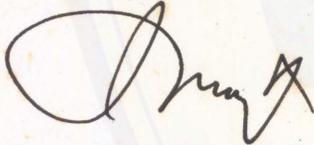
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

9 Juni 2001

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

**Ketua,**



Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes.

NIP. 131 624 478

**Sekretaris,**



Drs. Sonny Sumarsono, MM.

NIP. 131 759 836

**Anggota,**

Drs. Badjuri, ME.

NIP. 131 386 652

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

Drs. H. Liakip, SU.

NIP. 130 531 976



**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Penentuan Sektor Prioritas Pembangunan  
di Kabupaten Ponorogo Tahun 1995-1999  
Nama Mahasiswa : Langgeng Dwi Hantoyo  
NIM : D1A1 95104  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I



Drs. J. Sugiarto, SU

NIP. 130 610 494

Pembimbing II



Drs. Badjuri, ME

NIP. 131 386 652

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM

NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : 19 Mei 2001

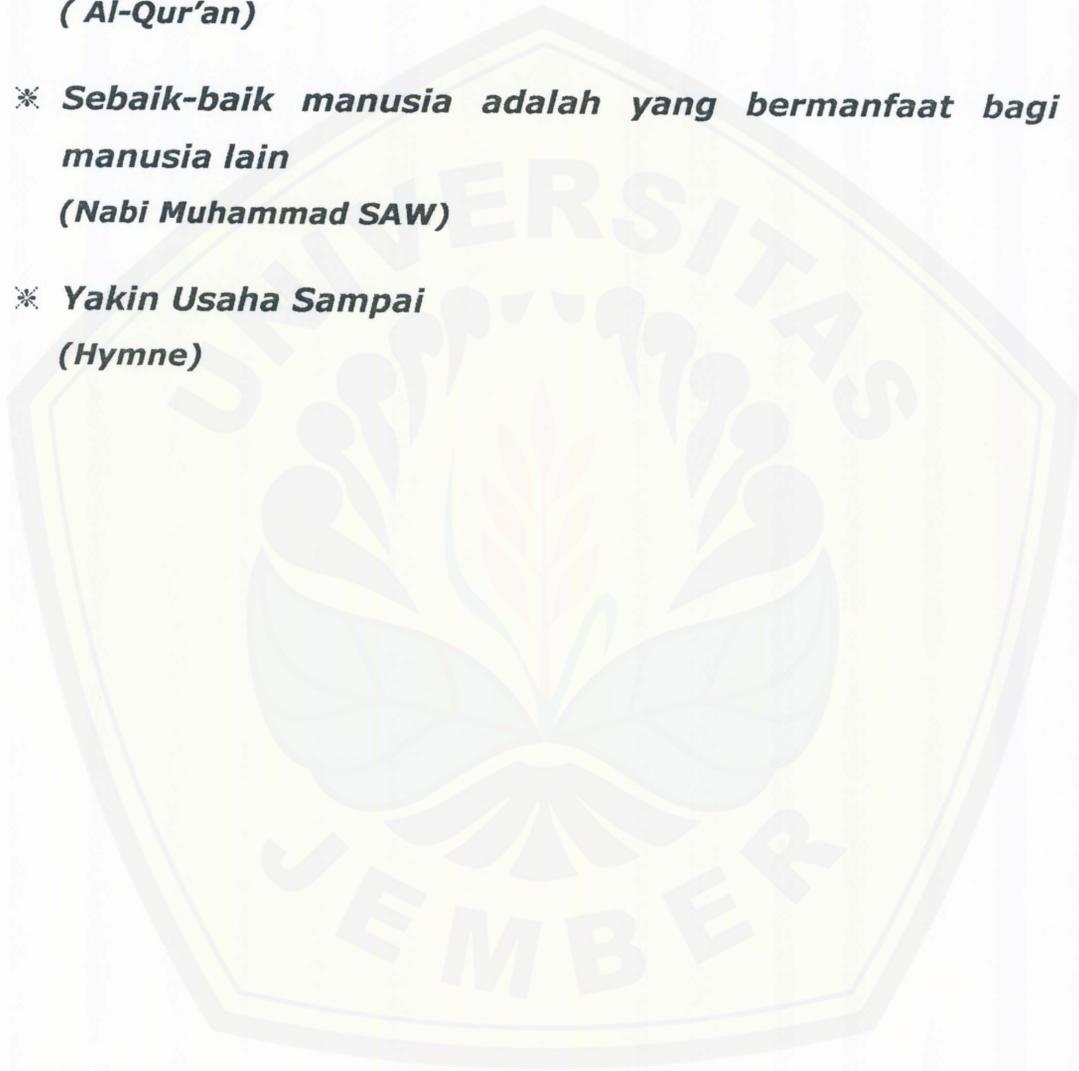


Karya ini aku persembahkan kepada:

- \* *Pengabdai ilmu dan pencari Kebenaran, serta kaum yang berpikir*

**Motto:**

- ✳ ***Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
( Al-Qur'an)***
- ✳ ***Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain  
(Nabi Muhammad SAW)***
- ✳ ***Yakin Usaha Sampai  
(Hymne)***



## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor prioritas pembangunan, koefisien pengganda pendapatan dan tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995-1999.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikutip dari Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo serta studi literatur. Metode analisa data yang digunakan adalah analisa *location quotient* (LQ) untuk mengetahui sektor prioritas pembangunan, koefisien pengganda pendapatan sektor prioritas pembangunan dihitung dengan teknik analisa pengganda pendapatan jangka pendek dan untuk mengetahui tingkat kebocoran yang mengalir ke luar sektor prioritas pembangunan dihitung dengan membagi pendapatan di luar sektor prioritas pembangunan dengan jumlah uang yang dibelanjakan secara lokal untuk barang dan jasa.

Sektor-sektor di Kabupaten Ponorogo pada tahun 1995-1999 yang memiliki indeks *location quotient* lebih besar dari satu adalah Sektor Pertanian, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Jasa-jasa. Sedangkan kelima sektor lainnya, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan pada tahun 1995-1999 memiliki indeks *location quotient* kurang dari satu. Sektor Bangunan pada tahun 1995-1999 memiliki koefisien pengganda pendapatan paling besar, diikuti kemudian Sektor Jasa-jasa, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Pertanian memiliki koefisien pengganda pendapatan paling kecil. Keempat sektor yang memiliki indeks *location quotient* lebih besar dari satu tersebut tahun 1995-1999 memiliki tingkat kebocoran yang relatif kecil. Bahkan semakin mendekati tahun 1999 semakin kecil.

Sektor yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995-1999 adalah Sektor Pertanian, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Jasa-jasa. Sektor Bangunan memiliki koefisien pengganda pendapatan paling besar. Sedangkan tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan tersebut relatif kecil.

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, yang telah mencerdaskan manusia lewat perantaraan kalam. Berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih membutuhkan masukan-masukan yang konstruktif guna lebih menyempurnakan isi dan manfaatnya. Oleh sebab itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan.

Penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan ketulusan hati yang jernih penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. J. Sugiarto, SU dan Bapak Drs. Badjuri, ME selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah banyak memberikan dan menyediakan bimbingan dan fasilitas selama penulis menempuh masa studi;
4. Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan bahan dan data;
5. Ayahku yang banyak memberikan pelajaran kehidupan dan ibuku yang cinta kasihnya tak putus waktu;
6. Kakakku, Mas Ian, yang telah membuatku tidak sendirian sebagai seorang anak;

7. Nenek, Paman dan Bulik, serta sepupu-sepupu kecilku Bayu, Sulis, Lambang, Arga, Rian, Titah, Pria dan Ayu yang selalu menghadirkan keceriaan dan kerinduan;
8. Keluarga Besar Bangka II/12, Mas Tikno, Mbak Roro, Ajik, Ajeng, Si Kecil Arin, Suut, Aziz, Huda, Arik, Kakak Cheng, Endik, Zaenal dan Bukhori yang telah memberikan makna kekeluargaan;
9. Saudara-saudaraku seperjuangan Mas Sarmudji, Mas O'on, Wijang, Mevi, Totok, Aris, Salim, Luky, Iwan, Maksum, Andik, Hamsiong 'Occy' serta para Insan Cita;
10. Dik Widi atas segala pelajarannya;
11. Karibku yang telah jauh, Heru, Renea, Indra, Wiwin dan Rina;
12. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember, utamanya Komisariat Ekonomi Unej yang telah mengasuhku dalam lingkungan ke-Islaman dan intelektual;
13. Teman-temanku SP Ganjil'95.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, Juni 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya .....	10
2.2 Landasan Teori .....	11
2.3 Hipotesis .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian .....	22
3.2 Daerah Penelitian .....	22
3.3 Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data .....	22
3.4 Metode Analisa Data .....	23
3.5 Definisi Operasional .....	24

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

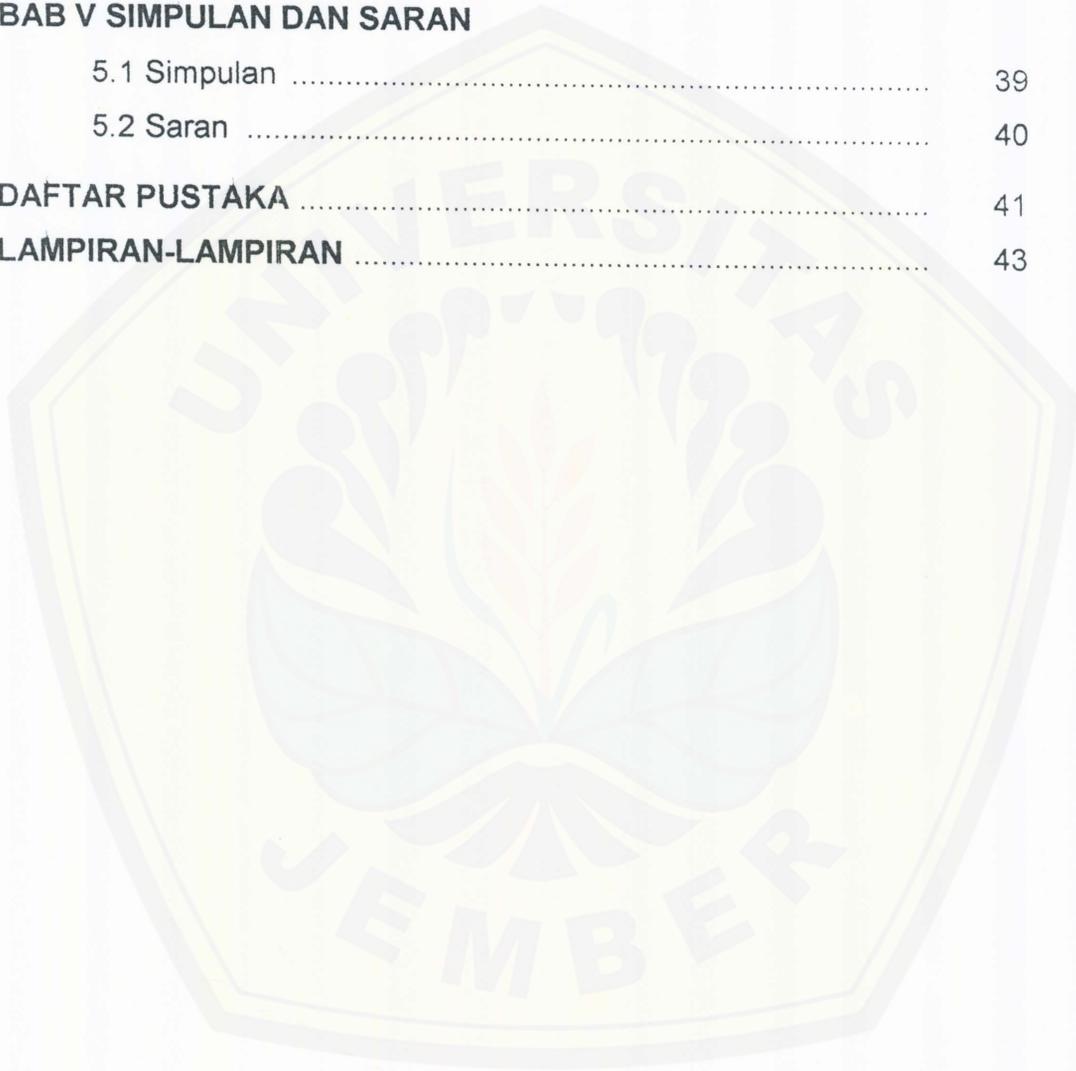
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	26
4.2 Hasil Analisis .....	33
4.3 Pembahasan .....	36

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	39
5.2 Saran .....	40

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>43</b>
--------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 1999 .....	28
Tabel 4.2 Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 1999 .....	29
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 5 Tahun Kabupaten Ponorogo Tahun 1999 .....	30
Tabel 4.4 Jumlah Lahir, Mati, Datang, Pindah dan Perkembangan Penduduk Pada Akhir Tahun Kabupaten Ponorogo Tahun 1999 .....	31
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Mata Pencaharian Kabupaten Ponorogo Tahun 1999 .....	32
Tabel 4.6 Indeks <i>Location Quotient</i> Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995-1999 .....	33
Tabel 4.7 Pengganda Pendapatan Sektor Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Tahun 1995-1999 .....	34
Tabel 4.8 Tingkat Kebocoran Sektor Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 1995-1999 .....	35

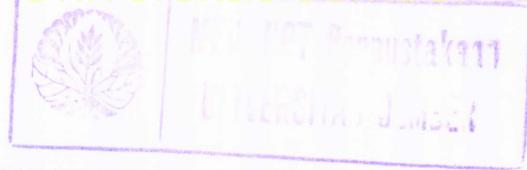
**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Hirarki Perencanaan Daerah ..... 13



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995-1999 (000,00 Rp)	43
Lampiran 2	Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995-1999 (000.000.000,00 Rp) .....	44
Lampiran 3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1995-1999 (000,00 Rp) .....	45
Lampiran 4	Pendapatan Sektor Non Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995-1999 (000,00 Rp) .....	46



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Garis-garis Besar Haluan Negara (1999: 17) memberikan arah terhadap misi bangsa Indonesia masa depan dalam pembangunan daerah adalah perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi tersebut memberikan arah kebijakan dalam pembangunan bidang ekonomi dengan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Paradigma baru pembangunan nasional Indonesia memberikan porsi yang besar kepada daerah untuk menyelenggarakan pembangunannya sendiri dalam bentuk pemberian kewenangan otonomi.

Pelaksanaan otonomi bukan hanya tuntutan formil yuridis, tetapi juga merupakan kebutuhan riil Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang berhadapan dengan zaman yang serba efisien. Sentralisasi yang ketat selain hanya menimbulkan pemerintahan biaya tinggi, juga diyakini tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman. Negara-negara dengan sentralisasi maksimum seperti Uni Soviet dan Negara-negara Blok Timur telah masuk dalam sejarah masa lalu. Otonomi bukan lagi hanya sebagai *trend*, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Pada saat sebuah keputusan, khususnya dalam arti ekonomi, tidak lagi bisa menunggu waktu yang sangat lama dari pusat sampai ke daerah di mana ia dilaksanakan, maka daerah menuntut untuk memperoleh otonomi.

UU No. 22 Tahun 1999 (1999: 54-56) menjelaskan bahwa memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung

jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka pada saat sekarang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 22 Tahun 1999 (1999: 56) menjelaskan bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Kewenangan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Kewenangan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Menurut Rasyid (Dwidjowijoto, 2000: 142), inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dengan otonomi daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.

Pemerintah daerah dituntut untuk mendayagunakan dana dengan prioritas sektor produktif yang berlanjut, atau memiliki kesinambungan dan efek multiplier, sehingga mampu menggerakkan kehidupan ekonomi daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlaku efektif mulai tahun 2001, yaitu dua tahun setelah diundangkannya dalam Lembaran Negara pada bulan Mei 1999. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut setiap daerah harus sudah mempersiapkan diri, terutama dalam rangka pembangunan ekonominya. Karena kemajuan pembangunan ekonomi menjadi faktor terpenting sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kemajuan dalam bidang lainnya tanpa diikuti kemajuan bidang ekonomi, maka rakyat akan tetap berada pada kekurangan dan kesengsaraan.

Pada era globalisasi ini, konfigurasi hubungan antar negara sangat ditentukan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi. Demikian juga pada masa-masa mendatang, dengan pelaksanaan otonomi daerah maka konfigurasi hubungan antar daerahpun sangat ditentukan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dari masing-masing daerah. Bahkan

hubungan ekonomi tidak lagi menjadi dominasi negara, tetapi justru didominasi oleh hubungan suatu kawasan dalam negara dengan kawasan di negara lain, seperti segi tiga Singapura, Johor dan Batam. Sehingga tidak berlebihan jika ekonomi menjadi faktor terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Daerah yang dimaksud disini adalah daerah otonom, yaitu Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Identifikasi potensi ekonomi masing-masing daerah sangat diperlukan untuk mengetahui keunggulan masing-masing daerah, terutama keunggulan komparatif, dalam rangka pembangunan ekonominya sehingga dapat ditemukan basis ekonomi daerah tersebut yang dijadikan dasar bagi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi tidak didasarkan pada potensi atau basis ekonomi dari masing-masing daerah, maka pengembangan kapasitas ekonomi daerahpun sulit akan terjadi. Keunggulan komparatif daerah yang dikreasikan dengan keunggulan kompetitif akan menjadikan daya hidup yang besar bagi perekonomian daerah, serta memberikan optimisme terhadap terselenggarakannya pembangunan secara berkesinambungan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan pula.

Pemahaman para pengambil kebijakan di daerah terhadap potensi ekonomi daerah menjadi hal yang sangat penting. Kurangnya pemahaman tersebut akan berakibat pada munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan sasaran. Bila hal ini terjadi, dan daerah tersebut semakin tertinggal dengan daerah lain, maka pemberian otonomi bukan sebagai peluang akan tetapi justru menjadi bencana.

Indonesia sebagai sebuah negara yang mempunyai wilayah luas dan terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil, permasalahan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan pertumbuhan wilayah antar daerah dapat diantisipasi dan diminimalkan.

Menurut Thomas (Budiharsono, 1989: 68) diduga penyebab pokok terjadinya ketimpangan pertumbuhan antar daerah adalah adanya perbedaan dalam struktur industri atau sektor ekonominya.

Adanya keragaman dalam struktur industri menimbulkan perbedaan pertumbuhan output produksi dan kesempatan kerja. Pada wilayah yang bertumbuh cepat, hal ini disebabkan struktur industri atau sektornya mendukung, dalam arti lain sebagian besar sektornya mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sedangkan bagi wilayah yang pertumbuhannya lamban, sebagian besar sektornya mempunyai laju pertumbuhan yang lamban. Pada titik permasalahan ini perlu dicari dan dikembangkan sektor ekonomi yang menjadi basis ekonomi daerah tersebut yang pertumbuhannya akan mampu memicu timbulnya efek multiplier bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.

Menurut Perraoux (Nuryasman, 1996: 242) perkembangan tidak muncul di semua tempat dan pada waktu yang bersamaan, timbulnya di beberapa tempat dengan intensitas yang berlainan, kemudian menyebar melalui berbagai macam saluran dan dengan efek yang berlainan pula. Daerah yang menjadi pusat pengembangan akan tumbuh lebih cepat, sedangkan daerah lainnya akan tertinggal di segala bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, daerah menjadi pusat pertumbuhan atau pengembangan yaitu daerah yang pertumbuhannya lebih cepat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Menurut Kadariah (1985: 61) *growthpole* dapat diartikan (diinterpretasikan) dengan dua cara, yaitu arti fungsional dan arti geografis dari *growthpole*.

1. Interpretasi fungsional dari *growthpole* menggambarkan *growthpole* itu sebagai suatu kelompok perusahaan, cabang industri, atau unsur-unsur dinamis yang menstimulir kehidupan ekonomi (dalam hal ini tidak terikat pada daerah geografis). Di sini yang penting adalah adanya permulaan dari serangkaian perkembangan dengan efek multipliernya.

2. Interpretasi geografis dari *growthpole* sesungguhnya lebih banyak merupakan suatu *pole attraction*, yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berkumpul di suatu tempat, tanpa adanya interaksi (hubungan) antara usaha-usaha tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa *growthpole* yang fungsional tidak mempunyai pengaruh atau akibat perkembangan geografis. Karena aktifitas-aktifitas ekonomi itu berkembang di suatu tempat (*space*), maka perkembangan ini menyangkut perkembangan geografis juga.

Konsep *growthpole* mengandung tiga sifat (*characteristics*), yaitu:

1. ada hubungan intern (*internal relationship*) antara berbagai macam unsur dengan nilai ekonomis;
2. ada efek multiplier;
3. ada konsentrasi geografis.

Definisi *growthpole* dengan demikian adalah suatu badan terdiri dari unsur-unsur ekonomis, terkumpul di suatu tempat geografis, dan ada hubungannya satu sama lain yang sebagai keseluruhan dapat mempercepat perkembangan.

*Growthpole* merupakan potensi perkembangan bagi unsur-unsur ekonomis yang ada dan dapat menarik unsur-unsur ekonomis lainnya yang tidak ada, sehingga dapat menimbulkan permulaan sesuatu proses perkembangan. Dengan demikian konsep *growthpole* merupakan peralatan kebijaksanaan ekonomi.

Menurut Myrdal (Nuryasman, 1996: 245) suatu daerah dapat diketahui mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya, bila di daerah itu ada tempat-tempat yang menarik, yaitu tempat-tempat yang memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan perekonomian. Pemerintah daerah dapat merangsang timbulnya tempat-tempat yang menarik tersebut dengan membangun fasilitas-fasilitas dan kebijakan-kebijakan yang mendukung yang mampu menarik masuknya investasi di kawasan tersebut.

Menurut Hirschman (Nuryasman, 1996: 243) kemajuan ekonomi tidak terjadi pada saat yang bersamaan di berbagai daerah, pembangunan akan terjadi apabila terdapat daya tarik kuat yang akan menciptakan konsentrasi ekonomi di sekitar daerah terjadinya pertumbuhan.

Kabupaten Ponorogo sebagai bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga mendapat kewenangan otonomi, harus mempersiapkan diri dalam pembangunannya supaya pemberian otonomi bukan sebagai bencana tetapi justru menjadi peluang untuk mengelola pembangunan daerah dengan lebih baik dan dengan prakarsa sendiri.

Secara umum keadaan ekonomi makro Kabupaten Ponorogo dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 1999 PDRB Kabupaten Ponorogo sebesar Rp. 661.380,579 juta, atau mengalami penurunan sebesar 1,18% dari tahun 1998 yang besarnya adalah Rp. 653.667,305 juta. Sektor Pertanian masih merupakan andalan Kabupaten Ponorogo dengan memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 34,37%. Sumbangan Sektor Pertanian ini mengalami penurunan sebesar 0,58% dari tahun 1998 yang sumbangannya terhadap PDRB sebesar 34,95%. Di lihat dari kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Ponorogo bercorak agraris.

Program Pembangunan Dasar (Propeda) Kabupaten Ponorogo (2001: 12) menyebutkan bahwa dengan menggunakan analisa model ekonometrik simultan makro regional (*Regression Analysis of Time Series* dan *Two Stage Least Squares*) dan analisa SWOT, serta dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan berbagai kemungkinan perkembangan keadaan di masa depan ditetapkan program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan) yang didukung oleh sistem irigasi yang baik menuju agrobis dan agro industri;

2. industri kecil, pedagang kecil yang didukung oleh koperasi dan pariwisata;
3. pertambangan.

Program prioritas pembangunan daerah ini disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yaitu "**Terwujudnya Kabupaten Ponorogo menjadi daerah yang sejahtera, berkeadilan dan berakhlak mulia dalam rangka *gawe gumuyune wong cilik***".

Analisis sektoral sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui sektor yang bisa dijadikan prioritas dalam pembangunan daerah sebagai salah satu dasar pemilihan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu analisis sektoral adalah analisis basis ekonomi daerah. Dengan analisis basis ekonomi daerah ini, maka akan dapat diketahui kemampuan ekspor sektoral daerah.

## 1.2 Perumusan Masalah

Realitas menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama ini muncul kepermukaan secara serentak dan meliputi segala sendi kehidupan masyarakat yang kesemuanya itu menuntut penanganan dengan segera. Namun demikian penanganan permasalahan yang saling terkait tersebut menjadi semakin sulit dengan adanya krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi dimensi dan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama keterbatasan dana.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga tidak terlepas dari kondisi tersebut. Oleh sebab itu dana pembangunan yang tersedia harus dialokasikan pada sektor-sektor produktif yang menjadi sektor prioritas pembangunan yang perkembangannya dapat memberikan efek multiplier pada sektor-sektor lain dan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan Teori Ekonomi Basis yang bertumpu pada kemampuan ekspor daerah, permasalahannya adalah sektor apakah yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995 -1999 yang diharapkan perkembangannya dapat memberikan efek multiplier bagi pembangunan selanjutnya;
2. mengetahui besarnya angka pengganda sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995-1999;
3. mengetahui tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995-1999.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat antara lain :

1. memberikan informasi dan masukan kepada pejabat-pejabat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Ponorogo dalam menentukan sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo;
2. memberikan informasi dan bahan kajian kepada peneliti yang berminat pada masalah yang berkaitan.

prioritas pembangunan karena memiliki nilai LQ lebih dari satu, yaitu 1,03880 pada tahun 1996 dan 1,07890 pada tahun 1997.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Perdagangan Internasional Neoklasik

Menurut Arief (1998: 42-44) pendekatan Neoklasik mengemukakan bahwa perdagangan bebas di mana setiap negara menspesialisasikan diri dalam produk di mana negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif akan menghasilkan kemakmuran yang optimal kepada seluruh negara yang terlibat dalam perdagangan internasional yang bebas ini. Perdagangan internasional yang bebas juga akan memperbesar volume perdagangan, sistem perdagangan bebas dipercayai akan cenderung menimbulkan tiga situasi utama pertama, sistem perdagangan bebas yang diiringi persaingan bebas tanpa proteksi akan menghindarkan berkembangnya *inefficiency*. Kompetisi yang bebas akan mendorong pihak produsen untuk melaksanakan proses produksi yang efisien dalam arti kata meminimumkan biaya produksi sehingga harga yang dibebankan pada pihak konsumen menjadi relatif murah. Liberalisasi perdagangan internasional diantisipasi akan mampu menimbulkan proses rasionalisasi industri dan alokasi sumber ekonomi yang optimal. Kedua, sistem perdagangan internasional yang bebas akan mampu menghindarkan atau meminimumkan ketidakstabilan ekonomi makro yang menjurus kepada timbulnya *stop go macroeconomic cycles*. Kebijakan proteksi yang disertai oleh adanya kurs mata uang yang tidak realistis (*overvalued currency*) cenderung akan mengakibatkan terjadinya *foreign exchange bottlenecks*. Terganggunya pembiayaan impor sebagai upaya penekanan defisit transaksi berjalan akan berpengaruh negatif terhadap besaran-besaran ekonomi makro yaitu tabungan dan investasi. Pada proses selanjutnya efek negatif terhadap pertumbuhanpun terjadi. Kebijakan devaluasi terbukti juga tidak mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan. Kebijakan

ini justru menimbulkan tekanan inflasi di dalam negeri. Bersamaan dengan ini, seandainya ditempuh kebijaksanaan mendeflasikan ekonomi demi mengurangi permintaan agregat untuk mencegah inflasi, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Akhirnya situasi ekonomi berputar-putar mengikuti irama *stop go cycles* seperti yang telah dikemukakan tersebut. Situasi ekonomi bergerak dari suatu ketidakseimbangan ke ketidakseimbangan lainnya, demikianlah seterusnya. Kebijakan perdagangan internasional diantisipasi akan dapat mengurangi intensitas ketidakstabilan ekonomi makro ini.

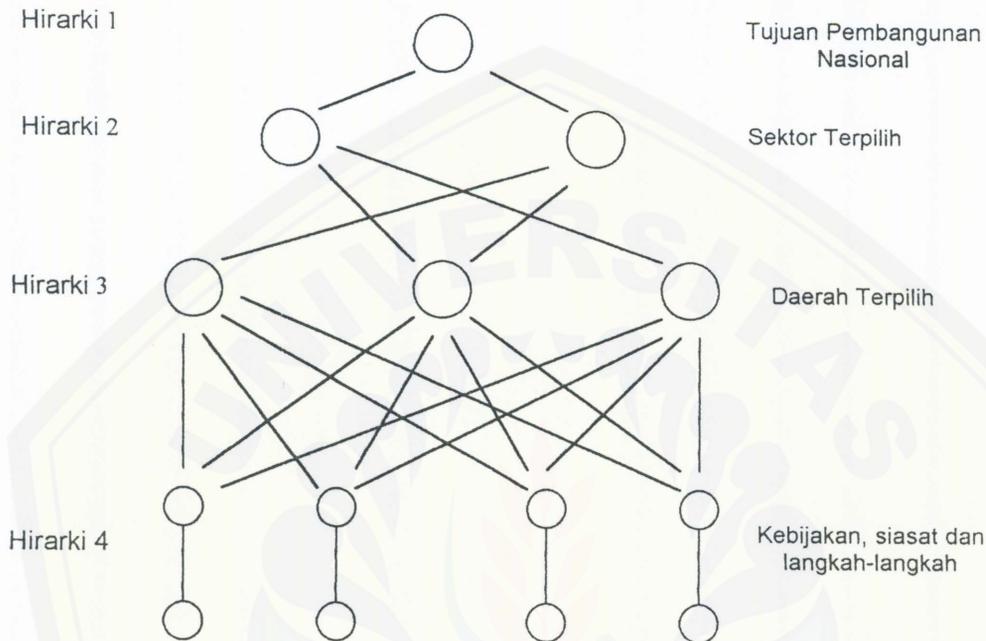
Ketiga, liberalisasi perdagangan internasional akan mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan memperluas produksi untuk ekspor. Liberalisasi perdagangan internasional diantisipasi akan menimbulkan situasi produksi yang berciri *increasing return to scale* sehingga dapat kompetitif di pasaran internasional. Situasi produksi ini dapat diraih melalui ekspansi pasar baik pasar domestik maupun pasar luar negeri.

Teori perdagangan bebas ini sebetulnya lebih memungkinkan berlaku secara penuh pada perdagangan inter-regional. Karena dalam kenyataannya untuk berlakunya mekanisme perdagangan internasional yang bebas ini banyak hambatan-hambatan yang ada seperti adanya kebijaksanaan perdagangan sebuah negara yang bersifat proteksionis.

### 2.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Azis (1994: 229) pengamatan tentang proses pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi-politik negara yang bersangkutan. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan (hirarki 2), untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional (hirarki 1); sub pertanyaan dapat berbentuk: berapa banyak harus diproduksi, dengan cara atau teknologi apa, dan kapan produksi dimulai. Setelah hirarki tahapan tersebut selesai, baru muncul pertanyaan di mana

aktivitas tiap sektor akan dijalankan (hirarki 3), selanjutnya hirarki proses perencanaan ditutup dengan pertanyaan standar menyangkut (hirarki 4): kebijakan apa, strategi apa, dan langkah-langkah apa yang perlu diambil.



Gambar 2.1 Hirarki Perencanaan Daerah

Berbeda dengan pendekatan sektoral, sesuai dengan namanya, pendekatan regional lebih menitikberatkan pertanyaan: daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Jadi hirarki 2 dan hirarki 3 bertukar tempat.

Pendekatan regional pada kenyataannya sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan hanya untuk daerah tertentu; misalnya daerah terbelakang, daerah perbatasan, atau daerah yang diharapkan mempunyai posisi strategis dalam arti ekonomi-politis.

Indonesia memerlukan gabungan antara dua pendekatan sektoral dan regional. Hal ini penting, tidak hanya dari segi konsep, tetapi juga dari segi pelaksanaannya, khususnya yang menyangkut koordinasi pembangunan di daerah dalam kerangka sistem pemerintahan yang ada.

Arah tersebut yang perlu dituju. Selama ini tampaknya selalu ada kecenderungan berat sebelah. Pendekatan sektoral sering (kalau tidak, selalu) mendominasi proses perencanaan.

### 2.2.3 Teori Kutub Pertumbuhan

Menurut Sitohang (1990: 153) Perraoux berpendapat bahwa fakta dasar dari perkembangan regional, sebagaimana perkembangan industri, adalah bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, pertumbuhan itu terjadi pada kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah, perkembangan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Lebih khusus lagi, menurut Sitohang (1990: 153) Boudeville mendefinisikan kutub pertumbuhan regional sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya.

Menurut Sitohang (1990: 155) Perraoux mengakui bahwa kutub pertumbuhan juga terdapat dalam ruang geografi, tetapi Boudeville-lah yang memperluas teori tersebut agar lebih komprehensif dapat mencakup dimensi geografik. Supaya perbedaannya jelas, istilah kutub pertumbuhan dapat diberikan pada konsep asli dari Perraoux tanpa suatu dimensi geografik yang spesifik, sedangkan istilah pusat pertumbuhan atau titik pertumbuhan adalah berkenaan dengan lokasi spasial.

Menurut Sitohang (1990:156-162) konsep-konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografik dari kutub pertumbuhan dapat didefinisikan dengan konsep *leading industry* dan perusahaan-perusahaan propulsip, konsep polarisasi dan konsep *spread effect*.

1. Konsep *leading industry* dan perusahaan-perusahaan propulsip menyatakan bahwa pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan propulsip yang besar, yang termasuk dalam

*leading industry* yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Suatu *leading industry* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. relatif baru, dinamik dan mempunyai tingkat teknologi maju yang menginjeksikan iklim gandrung pertumbuhan ke dalam suatu daerah;
  - b. permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapat yang tinggi, produk mana biasanya dijual ke pasar-pasar nasional;
  - c. mempunyai kaitan-kaitan antara industri yang kuat dengan sektor-sektor lainnya, kaitan-kaitan ini dapat berbentuk kaitan ke depan (*forward linkages*) atau kaitan ke belakang (*backward linkages*).
2. Konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industry* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke dalam kutub pertumbuhan. Implisit dari proses polarisasi ini adalah bermacam keuntungan aglomerasi (keuntungan intern dan ekstern skala).
3. Konsep *spread effect* menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsip dinamik dari kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang sekitarnya.

Sitohang (1990: 164) menyatakan bahwa ada beberapa sebab teori kutub pertumbuhan sangat menarik sebagai suatu sarana kebijaksanaan, yaitu:

1. teori ini cenderung menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan karena berbagai macam aglomerasi;
2. dilihat dari segi anggaran belanja negara, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah lebih murah daripada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah yang besar;
3. *spread effect* yang ditimbulkan oleh titik pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang sedang merosot.

#### 2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Deliarnov (1995: 36-37) dan Lipsey et al (1995: 39) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, yang melakukan usahanya di suatu daerah (*region*) tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tertentu.

Menurut Deliarnov (1995: 60) dan Lipsey et al (1995: 50) PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu:

1. PDRB atas dasar harga berlaku, adalah semua pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto;
2. PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, adalah semua pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

Menurut Partadiredja (1994: 12-16) penghitungan PDRB mempunyai manfaat bagi berbagai pihak yang dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu daerah, sehingga dari penghitungan PDRB dapat diketahui suatu daerah merupakan daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa;
2. membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu, dimana dalam penghitungan PDRB angka yang dicatat merupakan penjumlahan angka-angka selama jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, yang

dapat memberikan gambaran kenaikan atau penurunan, terjadinya perubahan struktur ekonomi atau tidak dan lain-lain;

3. membandingkan perekonomian antar daerah, yang digunakan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerahnya dengan daerah lain, sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan daerah tersebut, termasuk kriteria daerah maju atau daerah yang masih terbelakang;
4. merumuskan kebijaksanaan pemerintah, yaitu dengan mengetahui besarnya PDRB dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisinya pada tiap-tiap sektor ekonomi, sehingga dengan peningkatan pendapatan perkapita pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebijaksanaan daerah dan penggunaan dana investasi.

Menurut Deliarnov (1995: 37) PDRB dapat dihitung dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penghitungan dengan mempergunakan data daerah secara terpisah sama sekali dengan data nasional sehingga hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut. Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi, yaitu mengalokasi pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokator.

Menurut Deliarnov (1995: 38-47) dan Partadiredja (1994: 33-44) metode langsung dilakukan dengan mempergunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan produksi yaitu menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor. Pendekatan ini banyak digunakan pada

perkiraan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang, seperti pertanian, industri, pertambangan dan sebagainya. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2. Pendekatan pendapatan yaitu nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dalam hal sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya mencari untung surplus usaha tidak diperhitungkan. Bunga netto, sewa tanah dan keuntungan termasuk surplus usaha. Metode pendapatan ini lebih banyak digunakan pada sektor yang produksinya berupa jasa, seperti sektor lembaga keuangan dan jasa-jasa. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak tersedianya atau kurang lengkapnya data mengenai nilai produksi dan biaya antara.
3. Pendekatan pengeluaran yaitu bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau dilihat dari segi penggunaan maka *total supply* dari barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan *stock* dan ekspor netto. Dipakai ekspor netto karena yang akan dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri saja, maka dari jumlah penyediaan perlu dikeluarkan kembali nilai impornya.

Metode tidak langsung yaitu menghitung pendapatan regional dengan cara mengalokasikan angka pendapatan nasional untuk tiap-tiap daerah dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas nilai produk bruto atau netto, jumlah produksi phisik, tenaga kerja, penduduk, alokator tak langsung. Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator ini dapat

diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah terhadap nilai tambah secara nasional untuk setiap sektor atau subsektor.

### 2.2.5 Location Quotient (LQ)

Menurut Budiharsono (1989: 84) inti dari model ekonomi basis, yang menggunakan alat analisis *location quotient*, adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa, termasuk tenaga kerja.

Menurut Kadariah (1985: 72) dalam hubungan ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1. industri-industri (kegiatan ekonomi) yang melayani pasar daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah itu, yang disebut industri basis;
2. industri-industri (kegiatan ekonomi) yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri, yang disebut industri non basis atau industri lokal.

Dasar pemikiran dari penggunaan teknik ini adalah teori ekonomi basis yang maknanya adalah karena industri basis itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah yang bersangkutan maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi di daerah itu yang pada gilirannya dapat menaikkan pendapatan lagi dan kesempatan kerja. Jika di daerah itu terdapat pengangguran, maka kesempatan kerja yang baru itu dapat menampungnya, atau jika di daerah itu tidak terdapat pengangguran, maka daerah itu merupakan daya tarik tinggi bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan.

Kenaikan pendapatan di daerah itu tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan menaikkan permintaan terhadap hasil industri lokal non basis dan permintaan ini pada gilirannya akan menaikkan investasi di industri-industri tersebut terakhir. Dengan kata lain penanaman modal di industri-industri lokal merupakan investasi yang *induced* sebagai akibat kenaikan pendapatan di industri-

industri basis.

Kadariah (1985: 72) menyatakan bahwa tehnik analisa *location quotient* memiliki kelemahan antara lain:

1. selera dan pola pengeluaran atau pola konsumsi dari masyarakat berlainan di setiap daerah;
2. tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang tidak sama di setiap daerah;
3. keperluan-keperluan untuk produksi dan juga produktifitas buruh berbeda di antara daerah.

Menurut Kadariah (1985: 72) untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diperlukan asumsi sebagai berikut:

1. penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan daerah yang lebih luas;
2. permintaan daerah akan suatu barang pertama-tama dipenuhi dengan hasil daerah itu sendiri dan jika jumlah yang diminta melebihi jumlah produksi daerah tersebut maka kekurangannya didapat dari luar daerah.

Menurut Tiebout (Budiharsono, 1989: 90-91) alat ukur yang digunakan dalam model ekonomi basis sebaiknya adalah pendapatan, dan bukan tenaga kerja. Karena penggunaan alat ukur tenaga kerja mempunyai banyak kelemahan, seperti konversi pekerja paruh waktu (*part timer*) dan pekerja musiman menjadi tenaga kerja penuh tahunan. Masalah lain adalah tenaga kerja yang menglajo (*communitation*), yaitu mereka bekerja pada wilayah yang diteliti, tetapi tempat tinggalnya berada di wilayah lain. Karena masalah tersebut dan masalah-masalah lainnya seperti masalah produktifitas, maka tenaga kerja relatif kurang peka untuk mengukur perubahan terutama dalam jangka pendek.

Kelebihan pendapatan sebagai alat ukur ini terutama apabila model ekonomi basis digunakan untuk mengukur dampak potensial wilayah sebagai pasar. Kelebihan lainnya adalah pendapatan dapat mengukur perubahan kesejahteraan individu maupun masyarakat.

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Sektor Pertanian merupakan sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995-1999.



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif mengenai perkembangan perekonomian di Kabupaten Ponorogo tentang sektor prioritas pembangunan, pengganda sektor prioritas pembangunan dan tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan. Menurut Supranto (1994: 20) penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.

#### 3.2 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan alasan:

1. Kabupaten Ponorogo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan daerah otonom yang didasarkan asas desentralisasi;
2. Kabupaten Ponorogo mempunyai letak yang strategis untuk menghubungkan regional Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah yang juga merupakan salah satu penghubung paling selatan wilayah Propinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Pacitan dengan daerah pengembangan di Madiun.

#### 3.3 Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengutip data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo serta studi literatur yang sesuai penelitian ini.

### 3.4 Metode Analisa Data

Menurut Budiharsono (1989: 86) untuk menentukan sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo digunakan analisa *location quotient* (LQ), sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

dijelaskan bahwa:

- LQ<sub>i</sub> : indeks LQ dari sektor i pada daerah j;
- v<sub>i</sub> : pendapatan sektor i pada tingkat wilayah;
- v<sub>t</sub> : pendapatan total wilayah;
- V<sub>i</sub> : pendapatan sektor i pada tingkat nasional;
- V<sub>t</sub> : pendapatan total nasional.

Jika indeks LQ > 1 maka sektor tersebut merupakan sektor prioritas pembangunan, sedangkan jika indeks LQ < 1 maka sektor tersebut sektor non prioritas pembangunan. Jika indeks LQ = 0 maka sektor tersebut mampu swasembada.

Menurut Budiharsono (1989: 92) untuk menentukan besarnya pengganda sektor prioritas pembangunan dihitung dengan menggunakan teknik analisa pengganda pendapatan jangka pendek, sebagai berikut :

$$MS = \frac{Y}{YB} = \frac{1}{\frac{YB}{Y}} = \frac{1}{\frac{Y - YN}{Y}} = \frac{1}{\frac{Y}{Y} - \frac{YN}{Y}}$$

sehingga :

$$MS = \frac{1}{1 - \frac{YN}{Y}}$$

dijelaskan bahwa:

MS : pengganda sektor prioritas pembangunan;

Y : pendapatan total;

YB : pendapatan sektor prioritas pembangunan;

YN : pendapatan di luar sektor prioritas pembangunan.

Menurut Budiharsono (1989: 93) untuk menentukan tingkat kebocoran yang mengalir ke luar sektor prioritas pembangunan dibutuhkan faktor kecenderungan membelanjakan pendapatan dalam lokal. Tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TK = \frac{YN}{CL}$$

dijelaskan bahwa:

TK : tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan;

YN : pendapatan di luar sektor prioritas pembangunan (Rp);

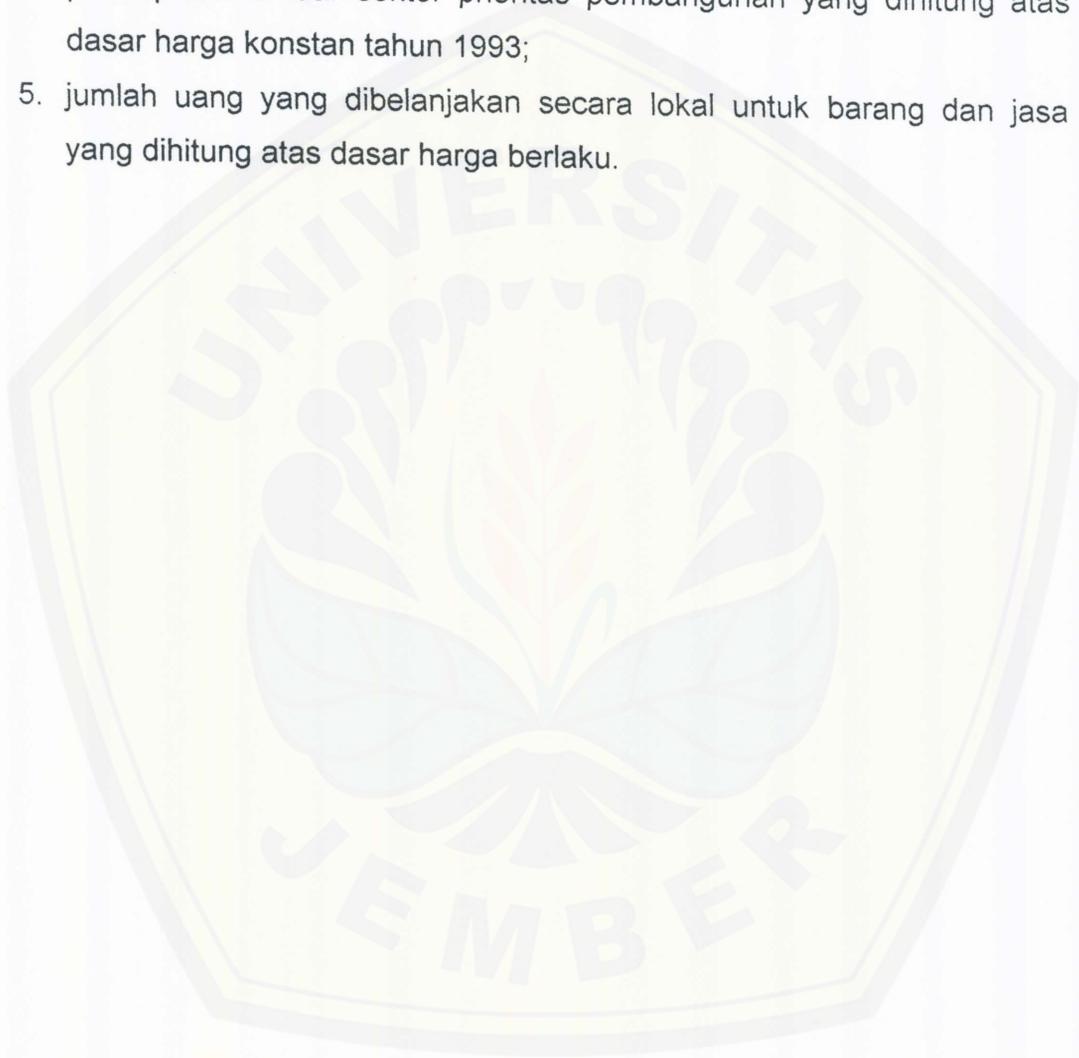
CL : jumlah uang yang dibelanjakan secara lokal untuk barang dan jasa (Rp).

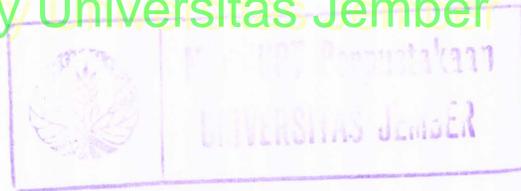
### 3.5 Definisi Operasional

Untuk memperjelas pengertian masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka digunakan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas dasar faktor produksi;
2. pendapatan total adalah jumlah pendapatan dari sektor prioritas pembangunan dan di luar sektor prioritas pembangunan yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 1993;

3. pendapatan sektor prioritas pembangunan adalah jumlah pendapatan sektor prioritas pembangunan yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 1993;
4. pendapatan di luar sektor prioritas pembangunan adalah jumlah pendapatan di luar sektor prioritas pembangunan yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 1993;
5. jumlah uang yang dibelanjakan secara lokal untuk barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku.





## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

#### 4.1.1 Keadaan dan Kondisi Geografis

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> yang terletak antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur dan 7° 17' - 8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 m sampai dengan 2.563 m di atas permukaan air laut, dengan ketinggian rata-rata antara 100 m sampai dengan 500 m dan tingkat kemiringan tanah berkisar antara 0% sampai dengan 40%. Kabupaten Ponorogo berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan Kabupaten Pacitan, sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah). Adapun jarak Ibu Kota Kabupaten Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah Timur Laut dan ke Ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah Barat.

Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi dua sub area, yaitu dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta kecamatan sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 km, sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah, sedang sisanya digunakan untuk tegal, pekarangan dan lainnya. Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau, dengan curah hujan rata-rata berkisar 2.250 mm/tahun. Pada tahun 1999 bulan Nopember mempunyai rata-rata curah hujan tertinggi sebesar 314 dengan hari hujan 17 dan bulan Juli mempunyai rata-rata curah hujan terendah sebesar 14 dengan hari hujan 3. Pada musim kemarau bulan terkering adalah bulan Agustus dan September. Diantara dua musim tersebut terdapat musim peralihan atau musim pancaroba yaitu sekitar bulan April - Mei dan Oktober - Nopember.

Dilihat dari letak daerah, maka Kabupaten Ponorogo mempunyai kedudukan yang strategis untuk menghubungkan regional Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah yang juga merupakan salah satu penghubung paling selatan wilayah Propinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pacitan, dengan pengembangan di Madiun.

#### 4.1.2 Penduduk

Menurut hasil registrasi tahun 1999, penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan bila dibandingkan akhir tahun 1998 sebesar 0,56%. Secara keseluruhan penduduk wanita sedikit lebih banyak dibanding penduduk pria. Sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan akhir tahun 1999 menunjukkan penurunan, yaitu dari 93,13% pada akhir tahun 1999 menjadi 96,12%, yang berarti penduduk di Kabupaten Ponorogo penduduk perempuannya lebih banyak dibanding penduduk pria dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk pria, kondisi ini hampir merata di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Mlarak.

Diantara 20 kecamatan yang ada, Kecamatan Ponorogo mempunyai penduduk yang paling banyak sebesar 75.164 jiwa atau sebesar 8,45% dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo, disusul kemudian dengan Kecamatan Babadan dan Kecamatan Sawoo.

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan Tahun 1999

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1. Ngrayun	27.584	27.967	55.560	98,60
2. Slahung	25.315	26.984	52.299	93,81
3. Bungkal	17.708	19.075	36.783	92,83
4. Sambit	18.647	19.475	38.122	95,75
5. Sawoo	29.623	30.900	60.523	95,87
6. Sooko	15.454	16.073	31.527	96,15
7. Pulung	23.986	25.000	48.986	95,94
8. Mlarak	18.688	17.049	35.737	109,61
9. Siman	18.932	19.685	38.617	96,17
10. Jetis	15.542	15.793	31.335	98,41
11. Balong	21.910	23.198	45.108	94,45
12. Kauman	21.364	21.682	43.046	98,53
13. Jambon	19.557	20.769	40.326	94,16
14. Badegan	14.511	15.282	29.793	94,95
15. Sampung	18.618	20.978	39.596	88,75
16. Sukorejo	25.207	26.540	51.747	94,98
17. Ponorogo	36.370	38.794	75.164	93,75
18. Babadan	30.395	30.858	61.253	98,50
19. Jenangan	26.458	26.973	53.431	98,09
20. Ngebel	10.042	10.417	20.459	96,40
Jumlah 1999	435.911	453.501	889.412	96,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2000

Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan, dari 645 jiwa/Km<sup>2</sup> menjadi 648 jiwa/Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Ponorogo mempunyai kepadatan terbesar, yaitu 3.369 jiwa/Km<sup>2</sup>. Hal ini dimungkinkan karena Kecamatan Ponorogo merupakan pusat pemerintahan sekaligus perekonomian untuk Kabupaten Ponorogo. Sedangkan kepadatan terkecil di Kecamatan Ngrayun sebesar 301 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tabel 4.2: Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 1999

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Penduduk Per-Km	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
1. Ngrayun	184,76	11.195	55.560	301	5
2. Slahung	90,34	13.495	52.299	579	4
3. Bungkal	54,01	9.266	36.783	681	4
4. Sambit	59,83	9.235	38.122	637	4
5. Sawoo	124,71	13.144	60.523	485	5
6. Sooko	104,24	8.670	31.527	302	4
7. Pulung	127,55	12.017	48.986	384	4
8. Mlarak	37,20	7.532	35.737	961	5
9. Siman	37,95	9.150	38.617	1.018	4
10. Jetis	22,41	7.238	31.335	1.398	4
11. Balong	56,96	10.866	45.108	792	4
12. Kauman	36,61	9.469	43.046	1.176	5
13. Jambon	57,48	9.115	40.326	702	4
14. Badegan	52,35	6.849	29.793	569	4
15. Sampung	80,61	9.514	39.596	491	4
16. Sukorejo	59,58	11.668	51.747	869	4
17. Ponorogo	22,31	17.056	75.164	3.369	4
18. Babadan	43,93	13.814	61.253	1.394	4
19. Jenangan	59,44	12.628	53.431	899	4
20. Ngebel	59,51	4.488	20.459	344	5
Jumlah 1999	1.371,78	206.409	889.412	648	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2000

Komposisi penduduk Kabupaten Ponorogo dengan interval 5 tahun menunjukkan bahwa mayoritas penduduk mengelompok pada usia muda dimana kelompok terbesar pada usia 15 - 19 tahun dan kondisi yang hampir sama berada pada usia 10 - 14 tahun, 5 - 9 tahun serta 0 - 4 tahun.

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Janis Kelamin dan Kelompok Umur 5 Tahun 1999

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	36.168	36.146	72.314
5 - 9	36.841	37.680	74.521
10 - 14	37.163	38.115	75.278
15 - 19	37.421	38.436	75.857
20 - 24	35.770	35.917	71.687
25 - 29	33.227	34.020	67.247
30 - 34	30.792	32.288	63.080
35 - 39	29.021	30.277	59.298
40 - 44	27.560	29.038	56.598
45 - 49	25.720	26.922	52.642
50 - 54	23.434	24.873	48.307
55 - 59	20.849	21.999	42.848
60 - 64	18.151	19.461	37.612
65 - 69	15.542	16.957	32.499
70 - 74	13.438	14.675	28.113
75 +	14.814	16.697	31.511
Jumlah 1999	435.911	453.501	889.412

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2000

Perkembangan penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 4.954 jiwa (0,50%) lebih besar dibanding tahun lalu sebesar 4.437 jiwa (0,49%) dengan kontribusi dari kelahiran sebesar 10.050 jiwa, kematian sebesar 5.169 jiwa, pendatang sebesar 3.793 jiwa dan pindah sebesar 3.721 jiwa.

Tabel 4.4: Jumlah Lahir, Mati, Datang, Pindah dan Perkembangan Penduduk Pada Akhir Tahun 1999

Kecamatan	La- Hir	Mati	Da- tang	Pin- dah	Penduduk Akhir Tahun	Perkembangan Penduduk	
						Jiwa	%
1. Ngrayun	541	233	67	80	55.560	295	0,53
2. Slahung	519	302	191	194	52.299	214	0,41
3. Bungkal	426	250	153	227	36.783	102	0,28
4. Sambit	440	228	208	168	38.122	252	0,67
5. Sawoo	699	265	119	223	60.523	330	0,55
6. Sooko	344	190	55	65	31.527	144	0,46
7. Pulung	663	176	276	212	48.986	551	1,14
8. Mlarak	428	223	234	221	35.737	218	0,61
9. Siman	472	212	168	119	38.617	309	0,81
10. Jetis	376	208	62	87	31.335	143	0,46
11. Balong	576	326	190	178	45.108	262	0,58
12. Kauman	240	163	487	349	43.046	215	0,50
13. Jambon	509	233	32	80	40.326	228	0,57
14. Badegan	480	250	58	86	29.793	202	0,68
15. Sampung	506	336	79	179	39.596	70	0,18
16. Sukorejo	541	280	220	188	51.747	292	0,57
17. Ponorogo	836	471	698	661	75.164	402	0,54
18. Babadan	729	365	185	163	61.253	386	0,63
19. Jenangan	558	345	239	184	53.431	268	0,50
20. Ngebel	167	112	72	57	20.459	70	0,34
Jumlah	10.050	5.169	3.793	3.721	889.412	4.953	0,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2000

Penduduk Kabupaten Ponorogo sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani pengusaha sebesar 227.086 jiwa dan 136.952 jiwa sebagai buruh tani.

Tabel 4.5: Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Mata Pencaharian Kabupaten Ponorogo Tahun 1999

Kecamatan	Pegawai Negeri	Pegawai Swasta	ABRI	Pensiunan	Petani	Buruh Tani	Pedagang	Lainnya
1. Ngrayun	440	-	5	79	33.973	286	128	613
2. Slahung	677	122	14	346	11.257	7.360	806	9
3. Bungkal	717	62	47	89	15.749	6.654	529	3.056
4. Sambit	586	664	54	160	9.861	8.137	1.126	2.936
5. Sawoo	383	52	13	114	17.439	7.374	878	3.587
6. Sooko	521	23	8	69	11.212	5.359	468	232
7. Pulung	1.257	92	16	231	10.081	9.376	1.228	2.643
8. Mlarak	708	470	40	143	5.819	6.521	1.040	4.846
9. Siman	739	799	89	216	4.740	6.686	564	4.944
10. Jetis	446	356	44	142	4.847	4.530	599	1.086
11. Balong	811	336	76	186	11.238	5.704	696	604
12. Kauman	976	233	140	209	8.436	11.238	694	1.209
13. Jambon	327	98	21	71	6.073	4.582	320	424
14. Badegan	334	70	18	70	4.549	1.933	268	550
15. Sampung	481	687	24	150	14.157	8.792	504	811
16. Sukorejo	533	111	50	135	12.410	8.990	1.562	10.573
17. Ponorogo	3.062	11.676	251	1.573	3.466	2.729	14.607	18.143
18. Babadan	1.500	616	86	232	15.589	17.223	399	11.919
19. Jenangan	946	688	42	234	13.408	12.462	1.045	1.550
20. Ngebel	338	476	8	66	12.782	1.200	360	387
Jumlah	15.782	17.631	1.046	4.515	227.086	136.952	27.821	70.122

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2000

## 4.2 Hasil Analisis

Tabel 4.6: Indeks *Location Quotient* Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995 - 1999

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	2,201	2,221	2,298	2,022	1,988
Pertambangan dan Penggalian	0,073	0,076	0,081	0,069	0,071
Industri Pengolahan	0,262	0,240	0,234	0,220	0,218
Listrik, Gas dan Air Minum	0,433	0,447	0,428	0,442	0,440
Bangunan	0,972	1,021	0,998	1,375	1,354
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,396	1,476	1,485	1,472	1,488
Pengangkutan dan Komunikasi	0,741	0,802	0,777	0,857	0,877
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,713	0,722	0,706	0,798	0,873
Jasa-jasa	1,597	1,600	1,568	1,209	1,512

Keterangan: lihat lampiran 1 dan 2

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa selama tahun 1995 - 1999 sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Sektor Pertanian;
2. Sektor Bangunan;
3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran;
4. Sektor Jasa-jasa.

Indeks *Location Quotient* dari keempat sektor tersebut lebih besar dari satu, sebab keempat sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo sendiri dan juga mampu mengekspor ke daerah lain, sehingga seperti pendapat Kadariah (1985: 72) bahwa industri-industri (kegiatan ekonomi) yang melayani pasar daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah itu digolongkan industri atau sektor basis. Sektor Bangunan pada tahun 1995 dan 1997 bukan merupakan sektor prioritas pembangunan karena memiliki indeks *Location Quotient* (LQ) kurang dari satu, yang berarti hanya memenuhi kebutuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo sendiri. Menurut Kadariah (1985: 72) industri-industri (kegiatan ekonomi) yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri digolongkan industri atau sektor non basis.

Sektor-sektor yang bukan merupakan sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995 - 1999 yaitu:

1. Sektor Pertambangan dan Penggalian;
2. Sektor Industri Pengolahan;
3. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum;
4. Sektor Perdagangan dan Komunikasi;
5. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Indeks *Location Quotient* dari kelima sektor tersebut besarnya kurang dari satu, sebab kelima sektor tersebut selain tidak mampu mengekspor ke daerah lain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo. Menurut Kadariah (1985: 72) kelima sektor tersebut digolongkan dalam sektor non basis. Kecilnya indeks *Location Quotient* (LQ) dari kelima sektor tersebut disebabkan oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dapat menunjang perkembangan Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Tabel 4.7: Pengganda Pendapatan Sektor Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Tahun 1995 - 1999

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	2,828	3,015	2,942	2,861	2,910
Bangunan	-	12,510	-	13,001	12,635
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,287	4,046	3,992	4,240	4,234
Jasa-jasa	6,786	7,181	7,333	6,785	6,738

Keterangan: lihat lampiran 1

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa meskipun sedikit berfluktuasi, namun ada kecenderungan koefisien pengganda pendapatan keempat sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995 - 1999 relatif stabil. Koefisien pengganda yang paling besar dari keempat sektor

prioritas pembangunan tersebut adalah Sektor Bangunan, yaitu 12,510 pada tahun 1996, 13,001 pada tahun 1998 dan 12,635 pada tahun 1999. Hal ini berarti, setiap Rp. 1,00 pendapatan Sektor Bangunan berturut-turut menghasilkan pendapatan wilayah sebesar Rp. 12,510 pada tahun 1996, Rp. 13,001 pada tahun 1998 dan Rp 12,635 pada tahun 1999.

Sektor Bangunan mempunyai koefisien pengganda pendapatan yang paling besar sebab Sektor Bangunan merupakan sektor yang vital dan cukup dominan bagi kegiatan sektor-sektor ekonomi lainnya, perkembangan pembangunan sektor-sektor lainnya selalu membutuhkan perkembangan Sektor Bangunan. Peningkatan, atau besarnya, koefisien pengganda pendapatan Sektor Bangunan karena semakin dibutuhkannya sektor tersebut bagi aktivitas produksi sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sektor Pertanian memiliki koefisien pengganda pendapatan yang paling kecil karena karakteristik produk-produk sektor pertanian yang memiliki elastisitas pendapatan yang rendah.

Tabel 4.8: Tingkat Kebocoran Sektor Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 1995 - 1999

	1995	1996	1997	1998	1999
Tingkat Kebocoran Sektor Prioritas Pembangunan	0,234	0,149	0,210	0,093	0,081

Keterangan: lihat lampiran 3 dan 4

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo tahun 1995 - 1999 relatif kecil, bahkan semakin mendekati tahun 1999 tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan cenderung semakin kecil, kecuali tahun 1997. Pendapatan sektor prioritas pembangunan yang mengalir ke luar sektor prioritas pembangunan adalah sebesar 0,234 pada tahun 1995, 0,149 pada tahun 1996, 0,210 pada tahun 1997, 0,093 pada tahun 1998 dan 0,081 pada tahun 1999.

### 4.3 Pembahasan

Di Kabupaten Ponorogo Sektor Pertanian selama tahun 1995 - 1999 menjadi sektor prioritas pembangunan. Hal ini terkait dengan kondisi alam di Kabupaten Ponorogo yang relatif subur untuk lahan pertanian. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Propinsi Jawa Timur, yang mempunyai luas lahan sawah 35.000 Ha, terdiri dari daerah irigasi teknis seluas 30.713 Ha, setengah teknis seluas 412 Ha, non teknis seluas 2.257 Ha dan tadah hujan seluas 1.609 Ha. Sedangkan lahan kering seluas 102.178 Ha yang digunakan untuk pekarangan dan bangunan seluas 20.926 Ha, tegal atau ladang seluas 30.908 Ha, hutan seluas 46.990 Ha, perkebunan 200 Ha dan lainnya 3.154 Ha.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Ponorogo meliputi alluvial kelabu sampai kecoklatan, assosiasi alluvial - coklat kelabu, litosol, assosiasi andosol coklat kekuningan, assosiasi litosol dan mediteran serta gromosol kelabu. Jenis tanah ini berkaitan erat dengan tingkat kesuburan tanah, kepekaan terhadap erosi, cara pengolahan tanah, kedalaman efektif muka air tanah dan lain sebagainya. Struktur tanah yang ada meliputi alluvium vulkanik kuartar, andesit, endapan pleosit, vulkanik muda, batuan kapur dan cadas. Berdasarkan jenis dan struktur tanah maka Kabupaten Ponorogo termasuk daerah yang subur.

Hipotesis yang mengatakan bahwa Sektor Pertanian menjadi sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo selama tahun 1995 - 1999 adalah terbukti, meskipun Sektor Pertanian hanyalah salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan di samping Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Jasa-jasa. Sebagai salah satu daerah penyangga pangan Propinsi Jawa Timur, Sektor Pertanian di Kabupaten Ponorogo selain melayani pasar di daerah Kabupaten Ponorogo juga melayani pasar ke daerah lain, atau mengekspor ke daerah lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Kadariah (1985: 72) bahwa kegiatan

ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah itu termasuk sektor prioritas pembangunan.

Menurut Sitohang (1990: 156-162) konsep-konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografik dari kutub pertumbuhan, konsep *leading industry* dan perusahaan-perusahaan propulsip, menyatakan bahwa pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan propulsip yang besar, yang termasuk dalam *leading industry* yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Ponorogo bukan merupakan sektor prioritas pembangunan karena selain tidak mampu mencukupi kebutuhan pasar di daerah Kabupaten Ponorogo sendiri juga tidak mampu mengekspor ke pasar daerah lain, dan juga tidak mempunyai ciri-ciri sebagai perusahaan propulsip seperti yang disebutkan oleh Sitohang, yaitu;

1. relatif besar;
2. menimbulkan dorongan-dorongan pertumbuhan yang nyata kepada lingkungannya;
3. mempunyai kemampuan berinovasi yang tinggi;
4. termasuk dalam industri yang sedang tumbuh dengan cepat.

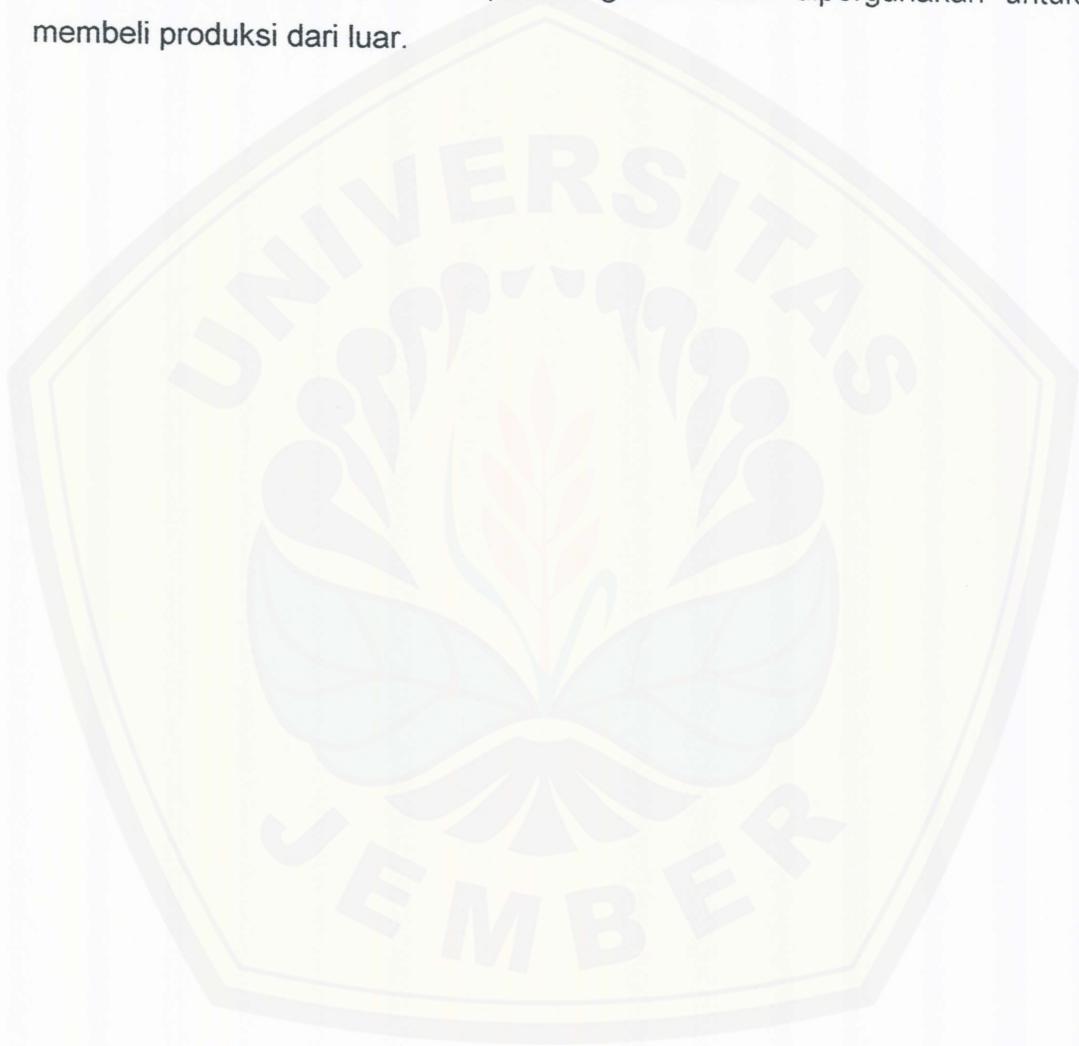
Sektor-sektor yang menjadi sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo mempunyai koefisien pengganda pendapatan yang relatif besar, ini sesuai dengan pendapat Kadariah (1985: 69) yaitu sektor yang dijadikan prioritas pembangunan mempunyai koefisien pengganda pendapatan yang besar.

Rendahnya tingkat kebocoran yang terjadi pada sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh:

1. pendapatan yang diperoleh dari sektor prioritas pembangunan tidak digunakan untuk membeli produksi dari luar (impor);
2. pendapatan yang diperoleh dari sektor prioritas pembangunan tidak digunakan untuk membayar upah pekerja dari luar daerah;

3. pendapatan yang diperoleh dari sektor prioritas pembangunan tidak digunakan untuk membeli sumber-sumber lainnya dari luar daerah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Budiharsono (1989: 93) bahwa rendahnya tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan karena pendapatan yang diperoleh dari sektor prioritas pembangunan tidak dipergunakan untuk membeli produksi dari luar.



## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

1. Sektor Pertanian di Kabupaten Ponorogo pada tahun 1995 – 1999 merupakan sektor prioritas pembangunan, karena memiliki indeks *location quotient* (LQ) lebih besar dari satu, yaitu 2,201, 2,221, 2,298, 2,022, 1,988. Di samping Sektor Pertanian, sektor yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo adalah (1) Sektor Bangunan; (2) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; dan (3) Sektor Jasa-jasa. Sektor Bangunan memiliki indeks *location quotient* (LQ) lebih besar dari satu pada tahun 1996 sebesar 1,021, tahun 1998 sebesar 1,375, dan tahun 1999 sebesar 1,354. Pada tahun 1995 dan 1997 Sektor Bangunan bukan merupakan sektor prioritas pembangunan karena memiliki indeks *location quotient* (LQ) kurang dari satu, yaitu sebesar 0, 972 dan 0,998. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 1995 – 1999 memiliki indeks *location quotient* (LQ) lebih besar dari satu, yaitu 1.396, 1,476, 1,485, 1,472 dan 1,488. Sektor Jasa-jasa pada tahun 1995 – 1999 memiliki indeks *location quotient* (LQ) lebih besar dari satu, yaitu 1,597, 1,600, 1,568, 1,209 dan 1,512.
2. Sektor Pertanian di Kabupaten Ponorogo pada tahun 1995 – 1999 memiliki angka pengganda pendapatan sebesar 2,828, 3,015, 2,942, 2,861 dan 2,910. Sektor Bangunan memiliki angka pengganda pendapatan sebesar 12,510 pada tahun 1996, 13,001 pada tahun 1998 dan 12,635 pada tahun 1999. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 1995 – 1999 memiliki angka pengganda pendapatan sebesar 4,287, 4,046, 3,992, 4,240 dan 4,234. Sedangkan Sektor Jasa-jasa pada tahun 1995 – 1999 memiliki angka pengganda pendapatan sebesar 6,786, 7,181, 7,333, 6,785 dan 6,738.

3. Tingkat kebocoran sektor prioritas pembangunan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 1995 – 1999 adalah sebesar 0,234, 0,149, 0,210, 0,093 dan 0,081.

## 5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebaiknya mengutamakan pembangunan pada sektor-sektor prioritas pembangunan yang memiliki indeks *Location Quotient* (LQ) lebih besar dari satu, yang perkembangannya dapat memberikan efek multiplier terhadap sektor-sektor lainnya dan perekonomian daerah secara keseluruhan, tanpa mengesampingkan pembangunan sektor-sektor non prioritas pembangunan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, I, J. 1994. **Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia**. Jakarta. LPFE-UI
- Arief, S. 1998. **Teori dan Kebijakan Pembangunan**. Jakarta. CIDES
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo. 2001. **Program Pembangunan Dasar (Propeda) Kabupaten Ponorogo Tahun 2001-2005**. Tidak Dipublikasikan. Bappeda Ponorogo
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 1997. **Ponorogo Dalam Angka 1996**. Ponorogo
- ..... 1999. **Ponorogo Dalam Angka 1998**. Ponorogo
- ..... 2000. **Ponorogo Dalam Angka 1999**. Ponorogo
- Bank Indonesia. 1997. **Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia**. Vol: XXX No. 7 Juli. Jakarta
- ..... 1997. **Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia**. Vol: XXX No. 10 Oktober. Jakarta
- ..... 1998. **Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia**. Vol: XXXI No. 8 Agustus. Jakarta
- ..... 1999. **Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia**. Vol: XXXI No. 12 Desember. Jakarta
- ..... 2001. **Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia**. Vol: III No. 1 Januari. Jakarta
- Budiharsono, S. 1989. **Perencanaan Pembangunan Wilayah**. Jakarta. LPFE-UI
- Dwidjowijoto, R, N. 2000. **Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi**. Jakarta. Elex Media Komputindo

- Deliarnov. 1995. **Pengantar Ekonomi Makro**. Jakarta. UI-Press
- Glasson, J. 1990. **Pengantar Ekonomi Regional**. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta. LPFE-UI
- Irawati, E. 2000. **Analisis Penetapan Sektor Prioritas Dalam Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994–1998**. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Jember. Universitas Jember
- Kadariah. 1985. **Ekonomi Perencanaan**. Jakarta. LPFE-UI
- Lipsey, R, G. Paul N Courant. Douglas D Purvis. dan Peter O Steiner. 1995. **Pengantar Makroekonomi**. Jilid Satu. Terjemahan Jaka Wasana, Kirbrandiko dan Budijanto. Jakarta. Bina Rupa Aksara
- Nuryasman. 1996. **Perkembangan Konsep Pusat Pertumbuhan: Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia**. Jakarta. Media Ekonomi Trisakti
- Partadiredja, A. 1994. **Perhitungan Pendapatan Nasional**. Jakarta. LP3ES
- Richardson, H, W. 1991. **Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional**. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta. LPFE-UI
- Sinar Grafika. 1999. **GBHN 1999–2004, Tap MPR No IV/MPR/1999**. Jakarta
- Sinar Grafika. 1999. **Undang-undang Otonomi Daerah 1999**. Jakarta
- Supranto, J. 1994. **Metodologi Penelitian**. Jakarta. LP3ES
- Yuniarti, R. 1999. **Analisis Basis Ekonomi Sektoral di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1993-1997**. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Jember. Universitas Jember

Lampiran 1

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995 - 1999 (000,00 Rp)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	224.848.543	231.453.436	239.850.271	228.459.254	227.304.805
Pertambangan dan Penggalian	4.281.171	4.680.134	5.031.552	4.466.391	4.565.098
Industri Pengolahan	39.684.566	39.559.159	41.336.780	36.241.674	37.350.669
Listrik, Gas dan Air Minum	3.065.137	3.482.742	3.772.136	4.284.628	4.680.527
Bangunan	46.958.162	54.169.977	56.909.914	50.279.634	52.346.126
Perdagangan, Hotel dan Restoran	148.065.303	167.481.717	176.755.036	154.176.248	156.202.393
Pengangkutan dan Komunikasi	33.770.931	38.948.046	40.733.295	40.196.244	41.098.412
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	40.428.626	43.498.476	45.017.099	39.228.039	39.679.161
Jasa-jasa	93.832.721	94.373.569	96.221.418	96.335.139	98.153.388
Jumlah	634.735.160	667.647.256	705.627.501	653.667.305	661.380.579

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, data diolah kembali.

## Lampiran 2

Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995 - 1999  
(000.000.000,00 Rp)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	61.766,8	63.743,0	64.149,2	64.987,7	65.361,5
Pertambangan dan Penggalian	35.502,2	37.568,7	38.181,5	37.353,1	36.831,5
Industri Pengolahan	91.580,6	102.259,6	108.631,5	94.847,5	97.786,3
Listrik, Gas dan Air Minum	4.276,9	4.840,4	5.414,0	5.582,2	6.084,8
Bangunan	29.197,8	32.923,7	35.036,8	21.035,4	22.093,8
Perdagangan, Hotel dan Restoran	64.113,7	69.371,9	73.160,5	60.253,0	59.997,9
Pengangkutan dan Komunikasi	27.555,0	29.701,2	32.204,0	26.975,1	26.782,2
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	34.368,9	37.400,5	39.184,2	28.278,7	25.996,5
Jasa-jasa	35.405,7	36.610,0	37.723,7	36.739,0	37.117,2
Jumlah	383.767,6	414.419,0	433.685,4	376.051,6	378.051,4

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, data diolah kembali.

## Lampiran 3

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1995 - 1999 (000,00 Rp)

Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
Pertanian	261.567.301	283.171.839	318.229.109	482.245.865	535.380.669
Pertambangan dan Penggalian	4.606.323	5.223.588	6.018.618	9.435.374	12.492.435
Industri Pengolahan	41.830.658	47.599.109	53.006.786	90.922.394	121.017.706
Listrik, Gas dan Air Minum	3.709.370	4.389.456	5.062.524	7.307.534	10.858.996
Bangunan	53.896.497	66.371.433	78.413.476	126.530.869	151.004.438
Perdagangan, Hotel dan Restoran	173.158.850	199.613.872	233.031.165	339.184.146	390.173.259
Pengangkutan dan Komunikasi	37.764.014	43.918.571	50.774.359	72.066.667	98.154.801
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	47.052.893	54.412.917	59.853.129	71.934.257	87.975.596
Jasa-jasa	96.647.547	102.816.284	113.123.798	134.748.558	161.634.131
Jumlah	720.233.453	807.517.069	917.512.964	1.334.375.664	1.568.692.031

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, data diolah kembali.

Lampiran 4  
Pendapatan Sektor Non Prioritas Pembangunan Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1995 - 1999 (000,00 Rp)

Sektor Non Prioritas Pembangunan	1995	1996	1997	1998	1999
Pertambangan dan Penggalian	4.281.171	4.680.134	5.031.552	4.466.391	4.565.098
Industri Pengolahan	39.684.566	39.559.159	41.336.780	36.241.674	37.350.669
Listrik, Gas dan Air Minum	3.065.137	3.482.742	3.772.136	4.284.628	4.680.527
Bangunan	46.958.162	-	56.909.914	-	-
Pengangkutan dan Komunikasi	33.770.931	38.948.046	40.733.295	40.196.244	41.098.412
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	40.528.626	43.498.476	45.017.099	39.228.039	39.679.161
Jumlah	168.288.593	130.168.557	192.800.776	124.416.976	127.373.867

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, data diolah kembali.